

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan yang telah disusun secara matang dan terperinci dengan tujuan untuk mencapai hasil atau dampak tertentu. Implementasi bukan hanya menjalankan rencana, tetapi juga mencakup pengaturan sarana dan mekanisme yang mendukung agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Implementasi juga berkaitan dengan proses interaksi antara tujuan dan tindakan, serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.

Implementasi adalah proses di mana kebijakan atau program yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik (Mazmanian & Sabatier, 1984). Mereka menekankan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan tindakan fisik untuk melaksanakan kebijakan, tetapi juga mencakup interaksi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur organisasi, sumber daya yang tersedia, dan konteks sosial-politik di mana implementasi berlangsung.

Implementasi merujuk pada upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan (Mulyadi, 2015:12). Tindakan ini berupaya mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional dan berusaha mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan yang telah diputuskan sebelumnya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah Kemiskinan. Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu faktor utama di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan dapat diartikan secara sederhana sebagai keadaan di mana individu mengalami kekurangan finansial, memiliki pendapatan yang rendah, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu, dengan tujuan utama mendorong mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 menetapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai inisiatif untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang dikategorikan miskin dan rentan. Keluarga yang menerima bantuan ini harus terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dan mereka ditunjuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria untuk mendorong akses pendidikan dan kesehatan. Dengan syarat tertentu, program ini diharapkan dapat mendorong penerima untuk bersekolah dan memanfaatkan layanan kesehatan.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan,

Pasal 6 menjelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berhak menerima: a) Bantuan Sosial PKH; b) pendampingan dari program PKH; c) akses layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; serta d) Program Bantuan Komplementer yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kementrian Sosial melaksanakan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota/Kabupaten, agar dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah (Sitorus, 2024). Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui sistem perbankan yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan keluarga penerima manfaat (Kementrian Sosial, 2021:29). Kementrian Sosial mengalokasikan dana PKH kepada keluarga yang terdaftar dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan jumlah bantuan yang bervariasi sesuai kebutuhan khusus setiap kategori.

Tujuan utama pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup berbagai elemen penting untuk meningkatkan kualitas hidup para penerimanya. Pertama, program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dengan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kedua, PKH dirancang khusus untuk mengurangi pengeluaran sehari-hari yang seringkali membebani keluarga miskin dan rentan. Ketiga, program ini secara aktif berupaya untuk meningkatkan potensi pendapatan keluarga miskin dan rentan tersebut melalui berbagai aspeknya, meskipun mereka tetap berada di bawah tingkat pendapatan yang sama.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, khususnya di Kecamatan Medan Marelan, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Medan, tercatat lebih dari 5.800 keluarga di Kecamatan Medan Marelan yang telah menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu Labuhan Deli, Paya Pasir, Rengas Pulau, Tanah Enam Ratus dan Terjun. Di Kecamatan Medan Marelan, Program keluarga Harapan (PKH) telah berjalan selama beberapa tahun, namun efektivitas program ini masih diperdebatkan oleh masyarakat.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 menetapkan bahwa sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarganya/atau individu yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang mencakup komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau Kesejahteraan Sosial. Namun, di lapangan, seringkali program ini tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat observasi awal Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Labuhan Deli dengan Bapak Doni pada tanggal 19 Juni 2025, beliau mengatakan bahwa :

“Terdapat juga masalah lainnya mengenai tidak tepatnya sasaran Penerima Manfaat. Dalam Program ini masih banyak ditemukan ketidakakuratan data penerima bantuan yang mengakibatkan banyak keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewatkan. Banyak dari masyarakat yang mendapatkan program ini yang terdeteksi memiliki gaji diatas UMP (Upah Minimum Provinsi) sebesar Rp. 3.800.000, seharusnya program ini diberikan kepada keluarga yang termasuk dalam desil 1 hingga desil 4 dengan penghasilan dibawah Rp. 2.500.000, terdeteksi juga keluarga yang menggunakan listrik 2200V, seharusnya yang boleh memperoleh program ini memiliki daya listrik antara 450V hingga

1300V, serta ada keluarga penerima manfaat yang terdeteksi memiliki anggota keluarga ASN/POLRI/TNI, dalam program ini tidak di perbolehkan keluarga yang 1 KK (Kartu Keluarga) dengan keluarga yang ASN/POLRI/TNI”.

**Gambar 1. 1 Data Keluarga dengan daya Listrik 2200V**

Status YA pada kolom bansos artinya memiliki data riwayat pada bansos tersebut, untuk detailnya silahkan lihat pada menu detail

No	No KK	NIK	Nama	SEBAKO	PKH
1	127112100305*****	127112050355***** ( Non DTKS Keluarga dengan Daya PLN >= 2200 )	BACHTIAR M.	YA	YA
2	127112100305*****	127112711264***** ( Non DTKS Keluarga dengan Daya PLN >= 2200 )	CH***	TIDAK	TIDAK

Rows per page

(Sumber : Kordinator PKH Medan Marelan)

**Gambar 1. 2 Data Keluarga gaji diatas UMP**

No KK	NIK	Nama	SEBAKO
127112270314*****	127112050584***** ( Non DTKS Keluarga PPU/gaji diatas UMP ) ( Sebagai PPU/gaji diatas UMP )	ARFAN AMELA	TIDAK
127112270314*****	127112510912***** ( Non DTKS Keluarga PPU/gaji diatas UMP )	PU***	TIDAK
127112270314*****	127112590389***** ( Non DTKS Keluarga PPU/gaji diatas UMP )	SJ***	TIDAK
127112270314*****	127112670315***** ( Non DTKS Keluarga PPU/gaji diatas UMP )	AR***	TIDAK

Rows per page: 50

(Sumber : Kordinator PKH Medan Marelan)

**Gambar 1. 3 Data Keluarga Terdeteksi ASN/POLRI/TNI**

bansos artinya memiliki data riwayat pada bansos tersebut, untuk detailnya silahkan lihat pada menu d

NIK	Nama	SEBAKO	P
**** <input type="checkbox"/> 1271121205590004 <input type="checkbox"/> ( Non DTKS Keluarga ASN/POLRI/TNI )	IDHAM SAMAILA	TIDAK	Y
**** <input type="checkbox"/> 127112711259***** <input type="checkbox"/> ( Non DTKS Keluarga ASN/POLRI/TNI )	NU***	TIDAK	TID

Rows per page: 50 1-2 of 2

(Sumber : Koordinator PKH Medan Marelan)

Berdasarkan permasalahan di atas harapan dengan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Medan Marelan sangat berbanding terbalik. Secara umum, harapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Medan Marelan belum dapat tercapai secara optimal, efektivitas program ini masih diperdebatkan oleh masyarakat. Banyak kendala yang masih dihadapi, tantangan dalam pelaksanaan di lapangan yang menyebabkan manfaat dari program ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Marelan memang bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Meskipun terdapat berbagai hambatan dan permasalahan, Program Keluarga Harapan tetap memberikan dampak positif bagi beberapa keluarga penerima manfaat. Terutama dalam hal pendidikan, di mana bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak, seperti biaya pendidikan dan pembelian perlengkapan sekolah. Selain itu, dalam aspek kesehatan, program ini membantu

keluarga untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Meskipun program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui bantuan tunai bersyarat yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, kenyataannya terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran manfaat. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan data penerima, proses verifikasi dan validasi yang kurang efektif, serta faktor komunikasi dan pengawasan yang belum optimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun program berjalan dan memberikan manfaat positif kepada sebagian keluarga, ada kendala yang menghambat efektivitasnya dalam menjangkau seluruh keluarga yang membutuhkan secara tepat sasaran, sehingga mengurangi potensi dampak optimal dari program tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi peningkatan sosialisasi dan transparansi agar masyarakat memahami manfaat program. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi data penerima manfaat dan penguatan koordinasi antara petugas di lapangan. Pengembangan sistem pengaduan dan monitoring yang akuntabel juga penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan tepat sasaran dan efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Dengan latar belakang masalah yang peneliti uraikan diatas menimbulkan minat dan keinginan peneliti untuk membahas dan menuangkan hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Keluarga**

## **Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Medan Marelan”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Medan Marelan ?
2. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat yang di hadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Medan Marelan ?

### **1.3. Fokus Penelitian**

Berikut fokus penelitian untuk memperoleh suatu kejelasan data yang tepat dan akurat terhadap aspek-aspek yang harus diteliti yaitu:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Medan Marelan terfokus pada Sasaran Program dan Manfaat Program.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang di hadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Medan Marelan terfokus pada isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan.

#### **1.4. Tujuan Masalah**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Medan Marelan terfokus pada sasaran penerima program dan manfaat bagi penerima program.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat yang di hadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Medan Marelan terfokus pada isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pihak, yaitu :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kebijakan pengentasan kemiskinan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH), sehingga manfaatnya lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.